

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN


SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH RESIKO OPERASIONAL TAHUN 2023



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURAKARTA

Jl. Yap Tjwan Bing nomor 26 Jagalan Kec, Jebres
Kota Surakarta 57162

 (0271) 656812

 www.dispangtan.surakarta.go.id

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian mengacu pada lima unsur pengendalian intern yang merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur operasional dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian, pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern dengan pendekatan *Control Environment Evaluation (CEE)* dan *Control Self Assesment (CSA)* dengan memperhatikan struktur dan tata kelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Kepada semua pihak yang telah berperan dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih.

Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini dapat bermanfaat dan memiliki peran konkrit dalam pencapaian tujuan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Surakarta



Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680223 199208 1 002

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Struktur Organisasi.....	3
F. Pernyataan Tanggungjawab.....	3
BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	5
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	6
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	7
BAB III PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN	9
A. Penetapan Konteks/Tujuan	9
B. Hasil Identifikasi Risiko.....	11
C. Hasil Analisis Risiko	18
D. Pengendalian yang sudah dilakukan.....	20
E. Pengendalian yang Masih dibutuhkan.....	21
BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	23
BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	24
A. Pemantauan Berkelanjutan	24
B. Evaluasi Terpisah.....	25
C. Pelaksanaan Tindak Lanjut	25
D. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP	25
BAB VI PENUTUP	26
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	
Lampiran 2 : Daftar Risiko Prioritas Teridentifikasi	
Lampiran 3 : Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian	
Lampiran 4 : Rancangan Informasi dan Komunikasi Pengendalian	
Lampiran 5 : Rancangan Pemantauan Berkelanjutan Atas Pengendalian	
Lampiran 6 : Register Risiko	
Lampiran 7 : Dokumentasi	

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara; dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi

penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

- a. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta.
- d. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
- e. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang Struktur Pengelolan Risiko pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian , dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

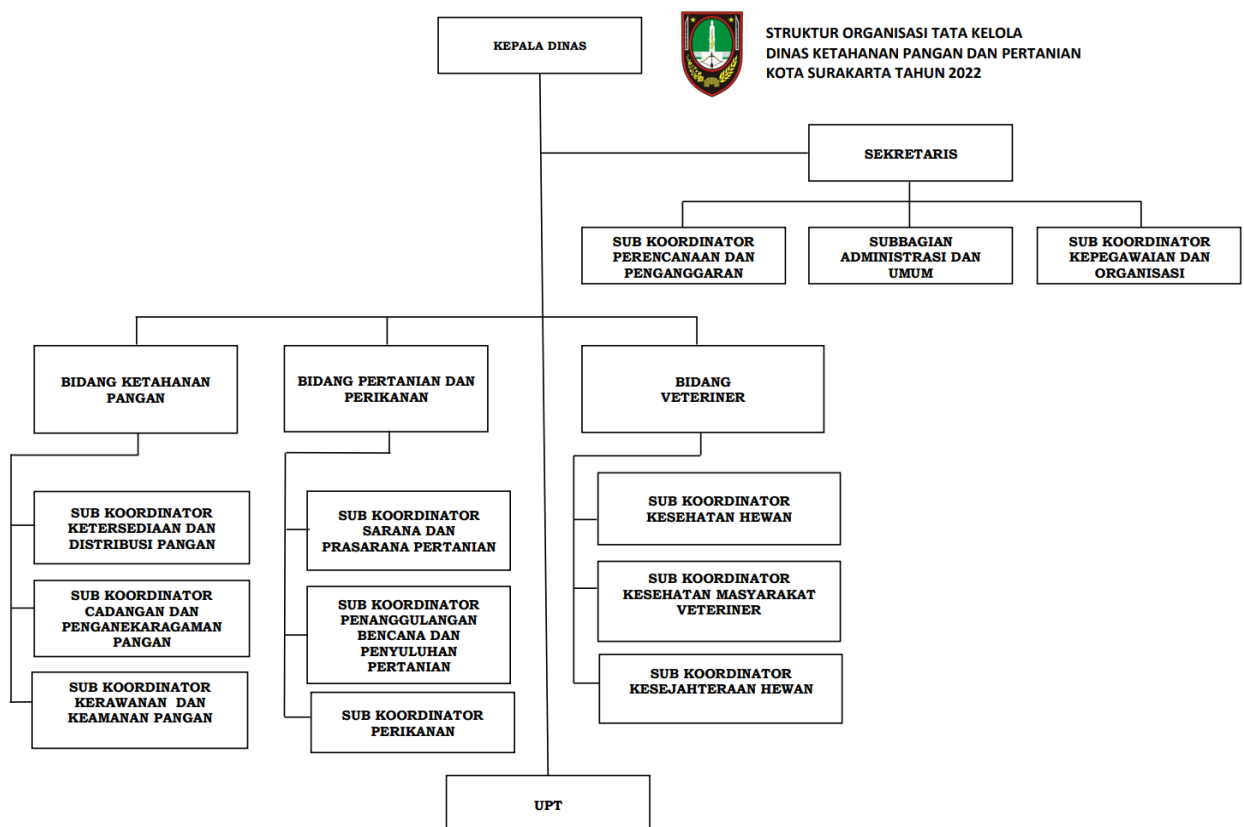
D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan terlaksana dalam tahun 2023.

E. Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri dari :



F. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Walikota Surakarta telah menerbitkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, yang memuat acuan pelaksanaan pengelolaan risiko dan pengendalian risiko di lingkungan Kota Surakarta. Untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang Struktur Pengelolan Risiko pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang memiliki tugas menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola Risiko Pemerintah Kota Surakarta untuk melaksanakan proses pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Struktur Pengelolan Risiko telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, melalui kegiatan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern yang telah ada dan menemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut antara lain dibahas materi tentang :

1. Metodologi penilaian kondisi lingkungan pengendalian dan teknis penyusunan rencana penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*.
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern.

Rencana Tindak Pengendalian Intern ini merupakan *action plan* untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu:

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian.
2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/ buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasi kannya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk :

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diperoleh gambaran sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Kurang Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Memadai

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, yaitu:

1. Kepemimpinan yang kondusif

Pendaftaran online Puskesmas untuk dibenahi dan Menambah jumlah Puskesmas dengan pelayanan yang lengkap;

2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

Penatausahaan aset tetap belum tertib dan hasil sensus BMD TA. 2021 belum dilakukan penyesuaian pada neraca LKPD TA. 2021 di UPT Rumah Potong Hewan

Kesimpulan atas kondisi lingkungan pengendalian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian sebagai berikut :

1. Kepemimpinan yang kondusif

Pendaftaran online Puskesmas untuk dibenahi dan Menambah jumlah Puskesmas dengan pelayanan yang lengkap.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dalam pelayanan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) sudah memiliki aplikasi dalam pendaftaran pasien, akan tetapi aplikasi saat ini sedang dalam perbaikan sehingga aplikasi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Karena hal tersebut, maka pelayanan Puskesmas dalam pendaftaran pasien dilakukan secara manual, dan diperlukan komitmen pimpinan, terkait kualitas informasi pelayanan yang bersifat manual

2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

Penatausahaan aset tetap belum tertib dan hasil sensus BMD TA. 2021 belum dilakukan penyesuaian pada neraca LKPD TA. 2021 di UPT Rumah Potong Hewan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dalam penataan asset sudah dilakukan melalui aplikasi penatausahaan barang milik daerah, akan tetapi dalam penatausahaan ada hal yang terlewat dan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan UPT Rumah Potong Hewan ada barang yang belum disesuaikan pada neraca LKPD. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab antara dinas dan UPT sudah dilakukan tetapi belum maksimal, untuk itu perlu adanya pendelegasian yang lebih jelas dan terdokumentasi.

No	ATRIBUT/ELEMEN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG BELUM MEMADAI	RENCANA TINDAK PERBAIKAN	Pemilik/ Penanggung Jawab	Tenggat Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF				
	Pendaftaran online Puskesmas untuk ditenahi dan Menambah jumlah Puskesmas dengan pelayanan yang lengkap	1. Perbaiki sistem pendaftaran online 2. Melengkapi sarana prasarana Puskesmas secara bertahap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Desember 2022
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT				
	Penatausahaan aset tetap belum tertib dan hasil sensus BMD TA. 2021 belum dilakukan penyesuaian pada neraca LKPD TA. 2021 di UPT Rumah Potong Hewan	Pengurus Barang untuk : 1. mengidentifikasi koreksi KIB C, 2. Koordinasi dan konsultasi dengan bidang aset, 3. Melakukan konsolidasi dengan bidang akuntansi dan perbendaharaan 4. melakukan kapitalisasi bangunan ke aset induk	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Mei 2022

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap program/kegiatan, risiko pada setiap program/kegiatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Pimpinan OPD.

Penetapan Konteks/tujuan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD), telah menetapkan kegiatan dan indikator keluaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang akan dilakukan penilaian risiko yaitu :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Indikator Kegiatan Persentase ketersediaan pangan tingkat kota terhadap kebutuhan pangan

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Indikator kegiatan : Kontribusi Energi serealialia terhadap kelompok pangan (%)

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator kegiatan Persentase penduduk rawan pangan tertangani
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan Prosentase Beras Aman, Prosentase Sayur Aman, Prosentase Buah Aman, Prosentase Biji-Bijian Aman
Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina
5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan Persentase ketersediaan cadangan pangan kota
6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan Persentase ketersediaan cadangan pangan kota
Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
7. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase penduduk rawan pangan tertangani
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan Prosentase kejadian/kasus penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali

9. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Indikator Kegiatan Persentase pengolah dan pemasara ikan yang terbina

B. Hasil Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Identifikasi risiko pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD), terdapat risiko yang mengancam pencapaian tujuan, sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil			
Sasaran 1. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman			
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terjadinya lonjakan harga pangan	Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah	Terjadi Inflasi harga pangan
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Masyarakat masih mengkonsumsi produk pangan berbahan dasar tepung terigu	Preferensi masyarakat untuk mengganti tepung terigu dengan tepung berbahan pangan lokal masih rendah	Permintaan konsumen tepung terigu tinggi dan impor tepung terigu meningkat

Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penduduk rawan pangan tidak bisa ditangani secara merata	Masih banyak penduduk rawan pangan / Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH	Kerawanan Sosial
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kesadaran keamanan pangan pelaku usaha yang dibina rendah	Sarana prasarana usaha belum memenuhi persyaratan teknis minimal	Masih ditemukan produk pangan yang tidak layak konsumsi
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kualitas cadangan pangan berupa beras akan menurun	Penyimpanan cadangan pangan terlalu lama	Kualitas beras akan rendah
Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketersediaan cadangan pangan tidak sesuai batas yang diwajibkan	Kemampuan daerah dalam menyediakan cadangan pangan	Cadangan pangan tidak bisa memenuhi batas ideal sesuai jumlah penduduk
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) tidak bisa mendapat cadangan pangan untuk rawan pangan secara merata	Kemampuan daerah dalam menyediakan cadangan pangan untuk rawan pangan	Penduduk rawan pangan tidak segera tertangani
Sasaran 3. Meningkatnya Status Kesehatan Hewan dan Meningkatnya Produk Pangan Asal Hewan yang Layak Konsumsi			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tidak tepatnya penentuan langkah pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)	Kurangnya data ternak dan tidak adanya laporan masyarakat	Kasus penyakit hewan yang tidak terkendali

Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 4. Meningkatnya Produksi Tangkap, Budidaya dan Olahhan Ikan			
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Masih terdapat produk olahan ikan yang belum terjamin mutunya	Masih ada pelaku pengolahan dan pemasaran ikan yang belum memahami mutu dan keamanan hasil perikanan	Masih ada produk olahan ikan yang belum terjamin mutunya yang dipasarkan

C. Hasil Analisis Risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/ pilihan.

Analisis risiko pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil *Focus Group Discussion (FGD)*, terdapat nilai risiko, sebagai berikut :

RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI	SKALA DAMPAK	SKALA KEMUNGKINAN	SKALA LEVEL RISIKO
(1)	(2)	(3)	(4)
Terjadinya lonjakan harga pangan	3	3	9
Masyarakat masih mengkonsumsi produk pangan berbahan dasar tepung terigu	3	3	9
Penduduk rawan pangan tidak bisa ditangani secara merata	3	3	9
Kesadaran keamanan pangan pelaku usaha yang dibina rendah	3	3	9
Kualitas cadangan pangan berupa beras akan menurun	2	3	6
Ketersediaan cadangan pangan tidak sesuai batas yang diwajibkan	3	2	6
Penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) tidak bisa mendapat cadangan pangan untuk rawan pangan secara merata	2	3	6
Tidak tepatnya penentuan langkah pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)	2	3	6
Masih terdapat produk olahan ikan yang belum terjamin mutunya	2	3	6

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Sampai dengan saat ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Monitoring ketersediaan pangan dan koordinasi dengan daerah pemasok pangan;
2. Sosialisasi Pangan Lokal dengan pelatihan olahan pangan lokal;
3. Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan serta koordinasi lintas sektoral;
4. Sosialisasi Keamanan pangan bagi pelaku usaha dan Bimtek Keamanan Pangan bagi pelaku usaha;
5. Pemeliharaan dengan fumigasi;
6. Penghitungan cadangan pangan sesuai kementan;
7. Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) serta koordinasi lintas sectoral
8. Koordinasi lintas bidang dan sektoral dalam penyediaan data ternak
9. Pengujian kualitas produk olahan ikan (uji formalin dan merkuri) di pengolah ikan dan sebagian pasar

E. Pengendalian yang Masih dibutuhkan

Rencana Tindak Pengendalian merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor. Adapun kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut :

1. Gelar Operasi Pasar dan Fasilitasi distribusi pangan;
2. Pelatihan olahan pangan lokal bagi masyarakat dan Kelompok Kawasan Mandiri Pangan;
3. Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan;
4. Pemantauan keamanan pangan di pasar Modern dan tradisional dengan bekerjasama dengan Tim JKPD;
5. Monitoring cadangan beras secara rutin;

6. Mengusulkan alokasi cadangan pangan sesuai perhitungan kebutuhan cadangan pangan;
7. Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH);
8. Pendataan dilakukan secara terjadwal dan rutin;
9. Menambah jenis pengujian dan jumlah sampel pada produk olahan ikan;

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Informasi dan komunikasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai berikut :

1. Bazar dan Rapat TTI
2. Undangan pelatihan olahan pangan, Daftar Hadir peserta pelatihan olahan pangan, dokumentasi pelatihan olahan pangan
3. Dokumen Renja
4. SK Tim JKPD, Undangan Rapat JKPD, Daftar Hadir Rapat
5. SK tim monitoring cadangan beras, Undangan Rapat tim, daftar hadir, rapat tim monitoring, laporan hasil monitoring
6. Rapat koordinasi

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

A. Pemantauan Berkelanjutan.

Pemantauan sistem pengendalian intern bertujuan untuk menilai kinerjanya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya pemantauan, diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dari pengendalian yang dirumuskan oleh manajemen, menentukan penyebab gagalnya aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Pemantauan sistem pengendalian intern juga dimaksudkan untuk menilai efisiensi prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Prosedur yang tidak efisien akan dikomunikasikan kepada manajemen untuk diperbaiki. Dengan adanya pemantauan berkelanjutan, maka setiap saat dapat dilakukan pengecekan apakah pelaksanaan seluruh kegiatan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan dan tindakan perbaikan dapat segera direncanakan dan dilaksanakan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa pengendalian yang dicanangkan tersebut telah dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan operasi pasar dan fasilitasi distribusi pangan
2. Pemanfaatan pelatihan dengan monitoring tentang tindak lanjut kepada peserta pelatihan kawasan mandiri pangan
3. Monitoring Penerima manfaat cadangan pangan untuk rawan pangan
4. Pengawasan di Pasar Tradisional dan Modern bersama dengan Tim JKPD
5. Memeriksa tempat penyimpanan Cadangan Pangan secara periodic
6. Membuat nota dinas ke TAPD
7. Membuat nota dinas ke TAPD
8. Rapat Koordinasi Lintas Bidang
9. Melakukan Uji Sampel produk olahan ikan baik bahan baku maupun hasil olahan ikan

B. Evaluasi Terpisah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

C. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindak lanjutnya.

D. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada walikota.

BAB VI


PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Intern ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/ pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Surakarta



Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680223 199208 1 002

**PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN/ RTP ATAS KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
(RTP ATAS CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tahun Penilaian : 2023

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Kepemimpinan yang kondusif				
1	Pendaftaran online Puskesmas untuk ditenahi dan Menambah jumlah Puskesmas dengan pelayanan yang lengkap	1. Perbaiki sistem pendaftaran online 2. Melengkapi sarana prasarana Puskesmas secara bertahap	Kepala Dinas	Desember 2022	
II	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
1	Penatausahaan aset tetap belum tertib dan hasil sensus BMD TA. 2021 belum dilakukan penyesuaian pada neraca LKPD TA. 2021 di UPT Rumah Potong Hewan	Pengurus Barang untuk : 1. mengidentifikasi koreksi KIB C, 2. Koordinasi dan konsultasi dengan bidang aset, 3. Melakukan konsolidasi dengan bidang akuntansi dan perbendaharaan 4. melakukan kapitalisasi bangunan ke aset induk	Kepala Dinas	Mei 2022	

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tahun Penilaian : 2023
Tujuan Strategis : Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil
Urusan Pemerintahan : Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terjadinya lonjakan harga pangan	ROO.22.09.21.01	9	Bidang Ketahanan Pangan	Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah	Terjadi Inflasi harga pangan
2	Masyarakat masih mengkonsumsi produk pangan berbahan dasar tepung terigu	ROO.22.09.21.02	9	Bidang Ketahanan Pangan	Preferensi masyarakat untuk mengganti tepung terigu dengan tepung berbahan pangan lokal masih rendah	Permintaan konsumen tepung terigu tinggi dan impor tepung terigu meningkat
3	Penduduk rawan pangan tidak bisa ditangani secara merata	ROO.22.09.21.03	9	Bidang Ketahanan Pangan	Masih banyak penduduk rawan pangan / Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH	Kerawanan Sosial
4	Kesadaran keamanan pangan pelaku usaha yang dibina rendah	ROO.22.09.21.04	9	Bidang Ketahanan Pangan	Sarana prasarana usaha belum memenuhi persyaratan teknis minimal	Masih ditemukan produk pangan yang tidak layak konsumsi
5	Kualitas cadangan pangan berupa beras akan menurun	ROO.22.09.21.05	6	Bidang Ketahanan Pangan	Penyimpanan cadangan pangan terlalu lama	Kualitas beras akan rendah
6	Ketersediaan cadangan pangan tidak sesuai batas yang diwajibkan	ROO.22.09.21.06	6	Bidang Ketahanan Pangan	Kemampuan daerah dalam menyediakan cadangan pangan	Cadangan pangan tidak bisa memenuhi batas ideal sesuai jumlah penduduk

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) tidak bisa mendapat cadangan pangan untuk rawan pangan secara merata	ROO.22.09.21.07	6	Bidang Ketahanan Pangan	Kemampuan daerah dalam menyediakan cadangan pangan untuk rawan pangan	Penduduk rawan pangan tidak segera tertangani
8	Tidak tepatnya penentuan langkah pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)	ROO.22.09.21.08	6	Bidang Veteriner	Kurangnya data ternak dan tidak adanya laporan masyarakat	Kasus penyakit hewan yang tidak terkendali
9	Masih terdapat produk olahan ikan yang belum terjamin mutunya	ROO.22.09.21.09	6	Bidang Pertanian dan Perikanan	Masih ada pelaku pengolahan dan pemasaran ikan yang belum memahami mutu dan keamanan hasil perikanan	Masih ada produk olahan ikan yang belum terjamin mutunya yang dipasarkan

**PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN
(RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)**

Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tahun Penilaian : 2023
Tujuan Strategis : Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil
Urusan Pemerintahan : Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terjadinya lonjakan harga pangan	ROO.22.09.21.01	Monitoring ketersediaan pangan dan koordinasi dengan daerah pemasok pangan	Keterlambatan pasokan pangan	Gelar Operasi Pasar dan Fasilitasi distribusi pangan	Bidang Ketahanan Pangan	Desember
2	Masyarakat masih mengkonsumsi produk pangan berbahan dasar tepung terigu	ROO.22.09.21.02	Sosialisasi Pangan Lokal dengan pelatihan olahan pangan lokal	Hasil olahan pangan non terigu kurang diminati	Pelatihan olahan pangan lokal bagi masyarakat dan Kelompok Kawasan Mandiri Pangan	Bidang Ketahanan Pangan	Oktober
3	Penduduk rawan pangan tidak bisa ditangani secara merata	ROO.22.09.21.03	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan serta koordinasi lintas sektoral	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan melebihi alokasi anggaran	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan	Bidang Ketahanan Pangan	Desember

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Kesadaran keamanan pangan pelaku usaha yang dibina rendah	ROO.22.09.21.04	Sosialisasi Keamanan pangan bagi pelaku usaha dan Bimtek Keamanan Pangan bagi pelaku usaha	Pelaku usaha di pasar tradisional tidak bisa mengintervensi keamanan produk yang dijual	Pemantauan keamanan pangan di pasar Modern dan tradisional dengan bekerjasama dengan Tim JKPD	Bidang Ketahanan Pangan	Desember
5	Kualitas cadangan pangan berupa beras akan menurun	ROO.22.09.21.05	Pemeliharaan dengan fumigasi	Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas cadangan pangan	Monitoring cadangan beras secara rutin	Bidang Ketahanan Pangan	Desember
6	Ketersediaan cadangan pangan tidak sesuai batas yang diwajibkan	ROO.22.09.21.06	Penghitungan cadangan pangan sesuai kementan	Hasil perhitungan cadangan pangan tidak digunakan sebagai acuan penentuan pengadaan cadangan pangan	Mengusulkan alokasi cadangan pangan sesuai perhitungan kebutuhan cadangan pangan	Bidang Ketahanan Pangan	Desember
7	Penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) tidak bisa mendapat cadangan pangan untuk rawan pangan secara merata	ROO.22.09.21.09	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) serta koordinasi lintas sektoral	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) melebihi alokasi anggaran	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH)	Bidang Ketahanan Pangan	Desember
8	Tidak tepatnya penentuan langkah pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)	ROO.22.09.21.07	Koordinasi lintas bidang dan sektoral dalam penyediaan data ternak	frekuensi perubahan populasi ternak yang cukup cepat	pendataan dilakukan secara terjadwal dan rutin	Bidang Veteriner	Desember
9	Masih terdapat produk olahan ikan yang belum terjamin mutunya	ROO.22.09.21.08	Pengujian kualitas produk olahan ikan (uji formalin dan merkuri) di pengolah ikan dan sebagian pasar	Belum semua produk olahan ikan dilakukan pengujian dan belum semua jenis pengujian dilakukan pada produk olahan ikan	Menambah jenis pengujian dan jumlah sampel pada produk olahan ikan	Bidang Pertanian dan Perikanan	Desember

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Kota Surakarta
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil
 Urusan Pemerintahan : Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perbaiki sistem pendaftaran online	Perbaiki web	Kepala Dinas	UPT Puskesmas	Desember 2022	Desember 2022	
2	Melengkapi sarana prasarana Puskesmas secara bertahap	Koordinasi dan Nota Dinas	Kepala Dinas	UPT Puskesmas	2026	2026	
3	mengidentifikasi koreksi KIB C	Pencermatan oleh pengurus barang	Kepala Dinas	Pengurus Barang	Mei 2022	Apr-22	
4	Koordinasi dan konsultasi dengan bidang aset	Koordinasi	Kepala Dinas	Pengurus Barang	Mei 2022	Apr-22	
5	Melakukan konsolidasi dengan bidang akuntansi dan perbendaharaan	Koordinasi	Kepala Dinas	Pengurus Barang	Mei 2022	Apr-22	
6	melakukan kapitalisasi bangunan ke aset induk	Koordinasi antara dinas dan UPT	Kepala Dinas	Pengurus Barang	Mei 2022	Apr-22	

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tahun Penilaian : 2023
Tujuan Strategis : Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil
Urusan Pemerintahan : Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gelar Operasi Pasar dan Fasilitasi distribusi pangan	Monitoring dan Evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan operasi pasar dan fasilitasi distribusi pangan	Bidang Ketahanan Pangan	Desember	Desember	
2	Pelatihan olahan pangan lokal bagi masyarakat dan Kelompok Kawasan Mandiri Pangan	Pemanfaatan pelatihan dengan monitoring tentang tindak lanjut kepada peserta pelatihan kawasan mandiri pangan	Bidang Ketahanan Pangan	Desember	Desember	
3	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan	Monitoring Penerima manfaat cadangan pangan untuk rawan pangan	Bidang Ketahanan Pangan	Juni	Juni	
4	Pemantauan keamanan pangan di pasar Modern dan tradisional dengan bekerjasama dengan Tim JKPD	Pengawasan di Pasar Tradisional dan Modern bersama dengan Tim JKPD	Bidang Ketahanan Pangan	Desember	Desember	
5	Monitoring cadangan beras secara rutin	Memeriksa tempat penyimpanan Cadangan Pangan secara periodik	Bidang Ketahanan Pangan	Januari s/d desember	Januari s/d desember	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Mengusulkan alokasi cadangan pangan sesuai perhitungan kebutuhan cadangan pangan	Membuat nota dinas ke TAPD	Bidang Ketahanan Pangan	Juni	Juni	
7	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH)	Membuat nota dinas ke TAPD	Bidang Ketahanan Pangan	Juni	Juni	
8	pendataan dilakukan secara terjadwal dan rutin	Rapat Koordinasi Lintas Bidang	Bidang Veteriner	Maret	Juni	
9	Menambah jenis pengujian dan jumlah sampel pada produk olahan ikan	Melakukan Uji Sampel produk olahan ikan baik bahan baku maupun hasil olahan ikan	Bidang Pertanian dan Perikanan	Juni	Juni	

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
REGISTER RISIKO

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO	SEBAB	C/UC	DAMPAK	KODE RISIKO	LEVEL RISIKO			PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER				
						URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	KATEGORI										
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	SUMBER	URAIAN SEBAB	URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	D	K	SKOR	KATEGORI								
PROGRAM																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Tujuan Meningkatnya Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sektor Riil																		
Sasaran 1. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman																		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Laporan ketersediaan stok pangan terhambat	Kabid Ketahanan Pangan	Eksternal	Data dari distributor, pasar modern dan pasar tradisional tidak segera didapatkan.	Laporan ketersediaan pangan tidak tepat waktu.	OPD	ROO.2 2.09.21 .01	2,00	2,00	4,00	Rendah							
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Terlambatnya informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kabid Ketahanan Pangan	internal	Kurangnya kesadaran para distributor menyampaikan data secara transparan	Skor PPH Ketersediaan pangan tidak tepat waktu.	OPD	ROO.2 2.09.21 .02	2,00	2,00	4,00	Rendah							
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terjadinya lonjakan harga pangan	Kabid Ketahanan Pangan	Eksternal	Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah	Terjadi Inflasi harga pangan	Masyarakat	ROO.2 2.09.21 .03	3,00	3,00	9,00	Tinggi	Monitoring ketersediaan pangan dan koordinasi dengan daerah pemasok pangan	E	Keterlambatan pasokan pangan	Gelar Operasi Pasar dan Fasilitas distribusi pangan	Desember	Bidang Ketahanan Pangan	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER	
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
PROGRAM	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketersediaan cadangan pangan tidak sesuai batas yang diwajibkan	Kabid Ketahanan Pangan	Kemampuan daerah dalam menyediakan cadangan pangan	Eksternal	UC	Cadangan pangan tidak bisa memenuhi batas ideal sesuai jumlah penduduk	Peternak	ROO.2 2.09.21 .10	3,00	2,00	6,00	Rendah	Penghitungan cadangan pangan sesuai kementan	E	Hasil perhitungan cadangan pangan tidak digunakan sebagai acuan penentuan pengadaan cadangan pangan	Mengusulkan alokasi cadangan pangan sesuai perhitungan kebutuhan cadangan pangan	Desember	Bidang Ketahanan Pangan	
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kurangnya kompetensi penguji mutu beras	Kabid Ketahanan Pangan	Kurangnya pembinaan SDM yang menguasai kualitas beras	Eksternal	UC	Cadangan pangan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik	Masyarakat	ROO.2 2.09.21 .11	2,00	2,00	4,00	Rendah							
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tingginya konsumsi sereal	Kabid Ketahanan Pangan	Preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi beras masih tinggi dibanding sumber karbohidrat lain (jagung, kentang, ketela pohon, ketela rambat dll)	Eksternal	UC	Kebutuhan beras meningkat	Masyarakat	ROO.2 2.09.21 .12	2,00	2,00	4,00	Rendah							
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun tidak segera dimulai	Kabid Ketahanan Pangan	Belum rilis data susenas konsumsi pangan dari BPS	Eksternal	UC	Nilai/Skor PPH konsumsi tidak tersusun tepat waktu	OPD	ROO.2 2.09.21 .13	2,00	2,00	4,00	Sedang							

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER	
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
PROGRAM	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Masyarakat masih mengkonsumsi produk pangan berbahan dasar tepung terigu	Kabid Ketahanan Pangan	Preferensi masyarakat untuk mengganti tepung terigu dengan tepung berbahan pangan lokal masih rendah	Eksternal	UC	Permintaan konsumen tepung terigu tinggi dan impor tepung terigu meningkat	OPD	ROO.2 2.09.21 .14	3,00	3,00	9,00	Tinggi	Sosialisasi Pangan Lokal dengan pelatihan olahan pangan lokal	KE	Hasil olahan pangan non terigu kurang diminati	Pelatihan olahan pangan lokal bagi masyarakat dan Kelompok Kawasan Mandiri Pangan	Desember	Bidang Ketahanan Pangan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun tidak dilaksanakan	Kabid Ketahanan Pangan	Nilai/Skor PPH konsumsi tidak tersusun tepat waktu	Eksternal	UC	tidak ada tindak lanjut antar instansi dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat	OPD	ROO.2 2.09.21 .15	2,00	2,00	4,00	Rendah							
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0	0	0	-	-	-	-	-											
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan tidak segera dimulai	Kabid Ketahanan Pangan	Kurangnya data dari eksternal (OPD lain dan kelurahan)	Eksternal	C	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan tidak tersusun tepat waktu	OPD	ROO.2 2.09.21 .16	2,00	2,00	4,00	Rendah							
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Keterlambatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kabid Ketahanan Pangan	Data dari OPD yang sulit dibreakdown per kelurahan	Eksternal	UC	keterlambatan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	OPD	ROO.2 2.09.21 .17	2,00	2,00	4,00	Rendah							

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO	SEBAB	C/UC	DAMPAK	KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER			
						URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	D	K							SKOR	KATEGORI	
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
PROGRAM																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penduduk rawan pangan tidak bisa ditangani secara merata	Kabid Ketahanan Pangan	Masih banyak penduduk rawan pangan / Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH	Eksternal	UC	Kerawanan Sosial	Warga Rawan Pangan	ROO.2 2.09.21 .18	3,00	3,00	9,00	Tinggi	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan serta koordinasi lintas sektoral	E	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan melebihi alokasi anggaran	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan	Desember	Bidang Ketahanan Pangan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Tidak tepatnya penentuan kelurahan yang rawan pangan	Kabid Ketahanan Pangan	Kurangnya data warga rawan pangan yang valid	eksternal	UC	Kasus rawan pangan yang tidak terkendali	Warga Rawan Pangan	ROO.2 2.09.21 .19	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) tidak bisa mendapat cadangan pangan untuk rawan pangan secara merata	Kabid Ketahanan Pangan	Kemampuan daerah dalam menyediakan cadangan pangan untuk rawan pangan	Eksternal	UC	Penduduk rawan pangan tidak segera tertangani	Warga Rawan Pangan	ROO.2 2.09.21 .20	2,00	3,00	6,00	Sedang	Pengadaan dan distribusi cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) serta koordinasi lintas sektoral	E	Jumlah kebutuhan cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH) melebihi alokasi anggaran	Menambah jumlah cadangan pangan untuk rawan pangan (Gakin P1 + P2 yang belum tercover BPNT dan PKH)	Desember	Bidang Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN																		
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel beras tidak terpenuhi	Kabid Ketahanan Pangan	Perencanaan dan administrasi belum sinkron	internal	C	Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan	OPD	ROO.2 2.09.21 .21	2,00	2,00	4,00	Rendah						
0	Jumlah sampel sayur tidak terpenuhi	Kabid Ketahanan Pangan	Perencanaan dan administrasi belum sinkron	internal	C	Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan	OPD	ROO.2 2.09.21 .22	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER	
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
PROGRAM	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kurangnya kompetensi operator alsintan	Kabid Pertanian dan Perikanan	Kurangnya pembinaan operator alsintan	Internal	C	Alsintan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik	Petani	ROO.2 2.27.09 .01	2,00	2,00	4,00	Rendah							
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terbatasnya jumlah sarana pendukung pertanian yang sesuai dengan komoditas	Kabid Pertanian dan Perikanan	Kurangnya jumlah sarana pendukung pertanian yang sesuai dengan komoditas	Internal dan Eksternal	C	sarana pendukung pertanian yang sesuai dengan komoditas belum merata	Petani	ROO.2 2.27.09 .02	2,00	2,00	4,00	Rendah							
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Adanya sarana pendukung pertanian yang tidak dimanfaatkan secara optimal	Kabid Pertanian dan Perikanan	sarana belum digunakan secara optimal	Internal dan Eksternal	C	Produktivitas hasil pertanian tidak optimal	Petani	ROO.2 2.27.09 .03	2,00	2,00	4,00	Rendah							
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Tidak terperiksanya kualitas obat hewan	Kabid Pertanian dan Perikanan	pemilik toko obat hewan tidak bersedia diperiksa kualitas obat hewan yang dijual	eksternal	C	Masih ada obat hewan ilegal	Masyarakat	ROO.2 2.27.09 .04	2,00	2,00	4,00	Rendah							
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Tidak semua obat hewan dapat diperiksa mutu,khasiat dan keamanan peredarannya	Kabid Pertanian dan Perikanan	Pemilik toko obat hewan tidak bersedia memberikan semua obat hewan yang dijual untuk diperiksa mutu,khasiat dan keamanan peredarannya	eksternal	C	Masih ada obat yang mutu,khasiat dan keamanan peredarannya tidak sesuai ketentuan yang disyaratkan	Masyarakat	ROO.2 2.27.09 .05	2,00	2,00	4,00	Rendah							
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ketersediaan benih/ bibit ternak yang tidak sesuai spesifikasi	Kabid Pertanian dan Perikanan	Keterbatasan jumlah benih/ bibit ternak yang sesuai spesifikasi	Eksternal	UC	Produksi ternak berkurang	Peternak	ROO.2 2.27.09 .06	2,00	2,00	4,00	Rendah							

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO	PEMILIK RISIKO	SEBAB	SUMBER	C/UC	DAMPAK		KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
						URAIAN DAMPAK	PIHAH YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAH YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
PROGRAM																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	berkurangnya jumlah benih/bibit yang dihasilkan karena Kualitas indukan yang menurun	Kabid Pertanian dan Perikanan	kurangnya regenerasi proses pembibitan ternak untuk indukan	Eksternal	C	berkurangnya jumlah benih/bibit yang dihasilkan	Peternak	ROO.2 2.27.09 .07	2,00	2,00	4,00	Rendah						
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																		
Pengembangan Prasarana Pertanian	Mundurinya penyusunan peta LP2B	Kabid Pertanian dan Perikanan	kurangnya koordinasi internal eksternal	internal	C	peta LP2B belum tersusun tepat waktu	Petani	ROO.2 2.27.09 .08	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	minimnya jumlah prasarana yang teridentifikasi	Kabid Pertanian dan Perikanan	kurangnya koordinasi internal eksternal	Internal dan Eksternal	C	Jumlah prasarana yg teridentifikasi belum tepat	OPD	ROO.2 2.27.09 .09	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pembangunan Prasarana Pertanian	Mundurinya jadwal pembangunan prasarana pertanian	Kabid Pertanian dan Perikanan	kurangnya koordinasi internal eksternal	Internal dan Eksternal	C	Prasarana pertanian tidak terbangun tepat waktu	Petani	ROO.2 2.27.09 .10	2,00	2,00	4,00	Rendah						
0	Mundurinya jadwal pembangunan prasarana RPH	Kabid Pertanian dan Perikanan	Perencanaan dan administrasi belum sinkron	Internal	C	Prasarana RPH tidak terbangun tepat waktu	OPD	ROO.2 2.27.09 .11	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Belum semua pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Kabid Pertanian dan Perikanan	besarnya jumlah pintu air yang perlu dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Internal	C	Pengairan belum merata	Petani	ROO.2 2.27.09 .12	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kurangnya fasilitas RPH, rusaknya prasarana RPH	Kabid Pertanian dan Perikanan	Lahan RPH yang terbatas, pemakaian prasarana RPH	Internal	C	Prasarana RPH tidak terbangun dan tidak terpelihara	OPD, Pemakaian fasilitas RPH dan Masyarakat umum	ROO.2 2.27.09 .13	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO	SEBAB	C/UC	DAMPAK	KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER			
						URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	D	K							SKOR	KATEGORI	
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
PROGRAM																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN																		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	kurangnya pemahaman petani tentang penerapan pola tanam berselang seling (padi-palawija)	Kabid Pertanian dan Perikanan	Sistem budidaya yang belum tepat	eksternal	UC	kesulitan dalam memutus siklus hama	Petani	ROO.2 2.27.09 .14	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	terjadinya serangan OPT tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Kabid Pertanian dan Perikanan	Sistem budidaya yang belum tepat	Eksternal dan Internal	C	penurunan produktivitas hasil pertanian	Petani	ROO.2 2.27.09 .15	2,00	2,00	4,00	Rendah						
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																		
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	jumlah petani yang teredukasi terbatas hanya pada petani yang aktif	Kabid Pertanian dan Perikanan	Kurangnya kesadaran anggota kelompok tani untuk mengikuti pertemuan kelompok	Internal	C	Diseminasi pengetahuan pertanian terhambat	Petani	ROO.2 2.27.09 .16	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian (bpps, posluhdes) yang dapat ditingkatkan kapasitasnya tidak ada	Kabid Pertanian dan Perikanan	kelembagaan penyuluhan pertanian tidak ada	Internal	C	tidak terbentuknya kelembagaan penyuluhan pertanian	Penyuluh	ROO.2 2.27.09 .17	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan petani pertanian yang dapat ditingkatkan kapasitasnya terbatas	Kabid Pertanian dan Perikanan	kelembagaan petani yang aktif yang bisa ditingkatkan kapasitasnya	Eksternal dan Internal	C	Diseminasi pengetahuan pertanian terhambat	Petani	ROO.2 2.27.09 .18	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER	
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
PROGRAM	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	terbatasnya jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Kabid Pertanian dan Perikanan	kelembagaan penyuluhan pertanian tidak ada	Internal		C	Diseminasi pengetahuan pertanian terhambat	Petani	ROO.2 2.27.09 .19	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	terbatasnya jumlah SL yang terlaksana	Kabid Pertanian dan Perikanan	lokasi SL masih dilaksanakan di dinas	Internal		C	Diseminasi pengetahuan pertanian terhambat	Petani	ROO.2 2.27.09 .20	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Sasaran 3. Meningkatnya Status Kesehatan Hewan dan Meningkatnya Produk Pangan Asal Hewan yang Layak Konsumsi																			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																			
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tidak tepatnya penentuan langkah pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ)	Kabid Veteriner	Kurangnya data ternak dan tidak adanya laporan masyarakat	eksternal		C	Kasus penyakit hewan yang tidak terkendali	masyarakat umum	ROO.2 2.27.09 .21	2,00	3,00	6,00	Sedang	Koordinasi lintas bidang dan sektoral dalam penyediaan data ternak	E	frekuensi perubahan populasi ternak yang cukup cepat	pendataan dilakukan secara terjadwal dan rutin	Desember	Bidang Veteriner
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Meningkatnya kasus kejadian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Kabid Veteriner	kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	eksternal		C	Kasus penyakit hewan yang tidak terkendali	masyarakat umum	ROO.2 2.27.09 .22	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO	SEBAB	C/UC	DAMPAK	KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER			
						URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	D	K							SKOR	KATEGORI	
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER														
PROGRAM																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Meningkatnya jumlah daerah terdampak kejadian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Kabid Veteriner	Kurangnya koordinasi eksternal dan internal dalam pengendalian penyakit	Eksternal dan Internal	C	Kasus penyakit hewan yang tidak terkendali	masyarakat umum	ROO.2 2.27.09 .23	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Masuknya penyakit hewan pada hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan	Kabid Veteriner	Pelaku usaha tidak memahami persyaratan lalu lintas hewan dan produk hewan	eksternal	C	Munculnya penyakit hewan melalui hewan dan produk hewan	masyarakat umum	ROO.2 2.27.09 .24	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kesalahan penilaian resiko penyakit hewan dan Keamanan Produk hewan	Kabid Veteriner	pelaku usaha tidak menyertakan persyaratan pemasukan/pengeluaran hewan dan produk hewan	Internal	C	Hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan tidak aman	masyarakat umum	ROO.2 2.27.09 .25	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Hewan dan produk hewan tidak memenuhi syarat teknis	Kabid Veteriner	Informasi persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran hewan belum tersampaikan ke semua pelaku usaha	Internal	C	Pelaku usaha melalulintaskan hewan tanpa memperhatikan persyaratan teknis	Masyarakat	ROO.2 2.27.09 .26	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan tidak dapat dilaksanakan di perbatasan	Kabid Veteriner	Tidak tersedia prasarana pemeriksaan hewan dan produk hewan di perbatasan	Internal	C	Hewan dan produk hewan dapat masuk/keluar kota tanpa pemeriksaan	Masyarakat	ROO.2 2.27.09 .27	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan jasa laboratorium tidak bisa dilaksanakan	UPT Puskesmas	Pengadaan bahan kimia tidak sesuai jadwal	internal	c	Tidak terjaminnya kualitas daging dan susu yang dikonsumsi masyarakat	masyarakat	ROO.2 2.27.09 .28	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO	SEBAB	C/UC	DAMPAK	KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER			
						URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	D	K							SKOR	KATEGORI	
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	tidak terlayannya pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan di klinik hewan	UPT Puskesmas	tidak terlaksananya pengadaan alat kesehatan habis pakai dan obat hewan sebagai sarana utama pemeriksaan di klinik hewan	internal	c	tidak terpantaunya penyakit hewan menular dan kesehatan hewan berpengaruh pada kesejahteraan manusia	masyarakat	ROO.2 2.27.09 .29	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Pemeriksaan daging dan susu tidak bisa dilaksanakan	Kabid Veteriner	Pengadaan bahan kimia tidak sesuai jadwal	internal	c	Tidak terjaminnya kualitas daging dan susu yang dikonsumsi masyarakat	masyarakat	ROO.2 2.27.09 .30	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan di klinik hewan tidak terlaksana	Kabid Veteriner	tidak terlaksananya pengadaan alat kesehatan habis pakai dan obat hewan sebagai sarana utama pemeriksaan di klinik hewan	internal	c	tidak terpantaunya penyakit hewan menular dan kesehatan hewan berpengaruh pada kesejahteraan manusia	masyarakat	ROO.2 2.27.09 .31	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan kurang memahami persyaratan teknis pengelolaan unit usaha hewan dan produk hewan	Kabid Veteriner	kurangnya informasi yang disampaikan kepada pelaku usaha tentang persyaratan teknis pengelolaan unit usaha hewan dan produk hewan	internal	C	Hewan dan produk hewan yang dihasilkan dari unit usaha tidak dapat diedarkan atau dilalulintaskan	pelaku usaha dan masyarakat umum	ROO.2 2.27.09 .32	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan tidak sesuai yang direncanakan	Kabid Veteriner	Pendampingan Unit Usaha harus dilakukan secara berulang	Internal	C	Terdapat produk yang dihasilkan dari Unit Usaha tidak sesuai standar	masyarakat umum	ROO.2 2.27.09 .33	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO	SEBAB	C/UC	DAMPAK	KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER			
						URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	D	K							SKOR	KATEGORI	
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
PROGRAM																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																		
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi perikanan tangkap menurun	Kabid Pertanian dan Perikanan	Sumber daya ikan berkurang	Eksternal dan Internal	C	Produktivitas perikanan tangkap berkurang	Nelayan PUD	ROO.2 2.25.06 .01	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Data produksi tangkap menurun	Kabid Pertanian dan Perikanan	Sumber daya ikan menurun	Internal	C	Produktivitas perikanan tangkap menurun	Nelayan PUD	ROO.2 2.25.06 .02	2,00	2,00	4,00	Rendah						
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																		
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kurangnya minat kelompok pembudidaya ikan dalam berbudidaya	Kabid Pertanian dan Perikanan	Kondisi sarana budidaya ikan yang mahal	Internal	C	Banyak kelompok pembudidaya ikan yang tidak melakukan budidaya ikan	Kelompok Pembudidaya Ikan	ROO.2 2.25.06 .04	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok pembudidaya ikan menurun	Kabid Pertanian dan Perikanan	sarana prasarana budidaya berkurang	Internal	C	Pembudidaya ikan menurun	Kelompok Pembudidaya Ikan	ROO.2 2.25.06 .05	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok pembudidaya ikan tidak terbentuk	Kabid Pertanian dan Perikanan	sarana prasarana budidaya tidak tersedia	Internal	C	kelompok pembudidaya ikan menurun	Kelompok Pembudidaya Ikan	ROO.2 2.25.06 .06	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan	Kelompok usaha perikanan menurun	Kabid Pertanian dan Perikanan	Informasi teknologi tidak tersampaikan	Internal	C	pengetahuan teknologi tidak tersampaikan	Kelompok Pembudidaya Ikan	ROO.2 2.25.06 .07	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER	
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
PROGRAM	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Pendidikan dan Pelatihan																			
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembudidaya ikan kecil banyak yang tidak memiliki Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)	Kabid Pertanian dan Perikanan	Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran pembudidaya ikan tentang TDPIK	Internal		C	Pembudidaya ikan yang memiliki TDPIK masih sedikit	Pembudidaya Ikan	ROO.2 2.25.06 .08	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembudidaya ikan tidak memiliki TDPIK	Kabid Pertanian dan Perikanan	Pengetahuan pembudidaya ikan tentang TDPIK tidak tersampaikan	Internal		C	Banyak pembudidaya ikan tidak memiliki TDPIK	Pembudidaya Ikan	ROO.2 2.25.06 .09	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pembudidaya ikan banyak yang tidak terbina	Kabid Pertanian dan Perikanan	Kurangnya kesadaran pembudidaya ikan untuk bergabung dalam kelompok	Internal		C	Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan kurang maksimal	Pembudidaya Ikan	ROO.2 2.25.06 .10	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data pembudidaya ikan menurun	Kabid Pertanian dan Perikanan	kelompok pembudidaya ikan menurun	Internal		C	Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan tidak tercapai	Pembudidaya Ikan	ROO.2 2.25.06 .11	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sarana budidaya ikan berkurang	Kabid Pertanian dan Perikanan	pembudidaya ikan tidak memiliki sarana	Internal		C	Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan tidak tercapai	Pembudidaya Ikan	ROO.2 2.25.06 .12	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO	SEBAB	C/UC	DAMPAK	KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER			
						URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	D	K							SKOR	KATEGORI	
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER														
PROGRAM																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembudidaya ikan kurang terbina	Kabid Pertanian dan Perikanan	berkurangnya pembudidaya ikan	Internal	C	Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan tidak tercapai	Pembudidaya Ikan	ROO.2 2.25.06 .13	2,00	2,00	4,00	Rendah						
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																		
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Pengolah hasil perikanan banyak yang tidak memiliki tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Kabid Pertanian dan Perikanan	Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran pengolah ikan tentang tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Internal	C	Pengolah ikan yang memiliki tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan masih sedikit	Pengolah ikan	ROO.2 2.25.06 .14	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data pengolahan hasil perikanan menurun	Kabid Pertanian dan Perikanan	Pengolah dan pemasar ikan tidak mengetahui cara memiliki tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Internal	C	Pengolah dan pemasar ikan tidak memiliki tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Pengolah ikan	ROO.2 2.25.06 .15	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Masih terdapat produk olahan ikan yang belum terjamin mutunya	Kabid Pertanian dan Perikanan	Masih ada pelaku pengolahan dan pemasaran ikan yang belum memahami mutu dan keamanan hasil perikanan	Eksternal	C	Masih ada produk olahan ikan yang belum terjamin mutunya yang dipasarkan	pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan	ROO.2 2.25.06 .16	2,00	3,00	6,00	Sedang	Pengujian kualitas produk olahan ikan (uji formalin dan merkuri) di pengolah ikan dan sebagian pasar	Belum semua produk olahan ikan dilakukan pengujian dan belum semua jenis pengujian dilakukan pada produk olahan ikan	Menambah jenis pengujian dan jumlah sampel pada produk olahan ikan	Desember	Bidang Pertanian dan Perikanan	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI					
PROGRAM																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sekretaris	ASN tidak memahami peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan penganggaran	Internal	C	Perencanaan dan penganggaran OPD tidak selaras dengan Visi Misi Walikota	OPD	ROO.2 2.09.21 .28	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sekretaris	ASN tidak memahami peraturan perundang-undangan terkait perencanaan	Internal	C	Perencanaan OPD tidak selaras dengan Visi Misi Walikota	OPD	ROO.2 2.09.21 .29	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA tidak tersusun tepat waktu	Sekretaris	Koordinasi dan sinkronisasi antara sekretariat dan bidang-bidang serta UPT tidak berjalan lancar	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan lancar	OPD	ROO.2 2.09.21 .30	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA perubahan tidak tersusun tepat waktu	Sekretaris	Koordinasi dan sinkronisasi antara sekretariat dan bidang-bidang serta UPT tidak berjalan lancar	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan perubahan tidak berjalan lancar	OPD	ROO.2 2.09.21 .31	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA tidak tersusun tepat waktu	Sekretaris	Koordinasi dan sinkronisasi antara sekretariat dan bidang-bidang serta UPT tidak berjalan lancar	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan perubahan tidak berjalan lancar	OPD	ROO.2 2.09.21 .32	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER	
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
PROGRAM	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA perubahan tidak tersusun tepat waktu	Sekretaris	Koordinasi dan sinkronisasi antara sekretariat dan bidang-bidang serta UPT tidak berjalan lancar	Internal		C	Pelaksanaan kegiatan perubahan tidak berjalan lancar	OPD	ROO.2 2.09.21 .33	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja tidak tersedia	Sekretaris	Tidak adanya informasi dari bidang dan UPT	Internal		C	Kepala dinas tidak bisa melakukan monev pencapaian kinerja OPD	OPD	ROO.2 2.09.21 .34	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja OPD tidak dapat terevaluasi dengan baik	Sekretaris	Koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang dan UPT tidak berjalan	Internal		-	OPD dalam pencapaian kinerja kurang maksimal	OPD	ROO.2 2.09.21 .35	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	waktu Pelaporan keuangan tidak tepat waktu	Sekretaris	Terjadinya penyesuaian atas pencatatan dalam laporan keuangan	internal		C	Penyelesaian penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan waktu yang di tetapkan	Karyawan Dispangtan	ROO.2 2.09.21 .36	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	adanya kebutuhan tambahan pembiayaan atas gaji	Sekretaris	Penambahan ASN	Internal		C	Anggaran gaji ASN menjadi terbebani	Karyawan Dispangtan	ROO.2 2.09.21 .37	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	adanya ketidakcocokan antara laporan dan anggaran	Sekretaris	selisih atas pajak yg di bayarkan	Internal		C	waktu penyelesaian penyusunan laporan keuangan menjadi mundur	OPD	ROO.2 2.09.21 .38	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO	SEBAB	C/UC	DAMPAK	KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER			
						URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	D	K							SKOR	KATEGORI	
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER														
PROGRAM																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pelaporan Keuangan belum sesuai dengan belanja	Sekretaris	terjadi perubahan pembiayaan atas GU	Internal	C	Pergeseran anggaran Kas yang memperlambat proses GU	OPD	ROO.2 2.09.21 .39	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlambat dalam melakukan Perbaikan	Sekretaris	Usulan perbaikan Peralatan yg terlambat	Internal	C	Tindak lanjut pemeliharaan menjadi lambat	OPD	ROO.2 2.09.21 .40	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	spesifikasi kebutuhan barang tidak sesuai	Sekretaris	tidak cermat dalam indentifikasi kebutuhan	Internal	C	peralatan digunakan tidak maksimal	OPD	ROO.2 2.09.21 .41	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	spesifikasi pengaman barang tidak sesuai	Sekretaris	tidak cermat dalam indentifikasi kebutuhan	Internal	C	Pengamanan barang milik daerah tidak maksimal	OPD	ROO.2 2.09.21 .42	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keterlambatan dalam penyusunan laporan barang	Sekretaris	adanya barang yg terklarifikasi hilang	Internal	C	pelaporan barang milik daerah menjadi terlambat	OPD	ROO.2 2.09.21 .43	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen administrasi kepegawaian tersusun tidak tepat waktu	Sekretaris	Perencanaan yang kurang tepat, adanya Maintenance aplikasi, adanya perubahan Jadwal	Internal	C	Proses administrasi kepegawaian terhambat	OPD	ROO.2 2.09.21 .44	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keterlambatan Penyusunan Dokumen dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sekretaris	Perencanaan yang kurang tepat, adanya Maintenance aplikasi, adanya perubahan Jadwal	Internal	C	keterlambatan pelaporan monev pegawai	OPD	ROO.2 2.09.21 .45	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI					
PROGRAM																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keterlambatan Penyusunan dan pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum	Sekretaris	Penjadwalan yang pelaksanaan yang berubah-ubah dan kurang teliti dalam memverifikasi administrasi	Internal	C	Laporan dan pelaksanaan yang tidak tepat waktu	OPD	ROO.2 2.09.21 .46	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	spesifikasi komponen listrik tidak sesuai	Sekretaris	tidak cermat dalam indentifikasi kebutuhan komponen listrik	Internal	C	peralatan digunakan tidak maksimal	OPD	ROO.2 2.09.21 .47	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	spesifikasi perlatan dan perlengkapan kantor tidak sesuai	Sekretaris	peralatan dan perlengkapan kantor	Internal	C	peralatan digunakan tidak maksimal	OPD	ROO.2 2.09.21 .48	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	spesifikasi barang cetakan tidak sesuai	Sekretaris	tidak cermat dalam indentifikasi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Internal	C	peralatan digunakan tidak maksimal	OPD	ROO.2 2.09.21 .49	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat koordinasi dan konsultasi tidak maksimal	Sekretaris	jumlah undangan kegiatan yang sedikit	Internal	C	serapan anggaran yang tidak maksimal	OPD	ROO.2 2.09.21 .50	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penjadwalan waktu pengadaan dan pergeseran anggaran	Sekretaris	perencanaan yang kurang tepat	Internal	C	Penjadwalan penyelesaian kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan	OPD	ROO.2 2.09.21 .51	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pengadaan Mebel	spesifikasi mebel tidak sesuai	Sekretaris	tidak cermat dalam indentifikasi kebutuhan mebel	Internal	C	peralatan digunakan tidak maksimal	OPD	ROO.2 2.09.21 .52	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
						URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
PROGRAM																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Proses pengadaan barang milik daerah tidak terlaksana sesuai aturan	Sekretaris	Spek barang terkendala TKDN	Internal	C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak tepat waktu	OPD	ROO.2 2.09.21 .53	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	spesifikasi gedung kantor tidak sesuai	Sekretaris	tidak cermat dalam indentifikasi kebutuhan kantor	Internal	C	peralatan digunakan tidak maksimal	OPD	ROO.2 2.09.21 .54	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan pengadministrasian yang belum baik	Sekretaris	verifikasi dokumen administrasi yg belum lengkap, kurangnya personil	Internal	C	keterlambatan dalam pengadministrasian umum, pelayanan umum kurang maksimal	OPD	ROO.2 2.09.21 .55	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Verifikasi surat tidak dilakukan dengan teliti	Sekretaris	pencatatan surat masuk dan keluar mengalami kekeliruan	Internal	C	keterlambatan informasi yang ditertera dalam surat	OPD	ROO.2 2.09.21 .56	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keterlambatan pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Ka UPT	Kenaikan TDL, biaya telepon,air	Internal	C	Urusan pemerintah daerah tidak berjalan maksimal	Karyawan AUP	ROO.2 2.09.21 .57	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	spesifikasi yang kurang tepat yang tidak sesuai kebutuhan	Sekretaris	peralatan dan perlengkapan kantor kurang sesuai dengan hasil yang diharapkan	Internal	C	kinerja menjadi kurang maksimal	OPD	ROO.2 2.09.21 .58	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER	
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
PROGRAM	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor mengalami keterlambatan pembayaran	Ka UPT	Kenaikan UMR TKPK	Internal		C	Pelayanan Administrasi dan Lapangan tidak maksimal	Karyawan AUP	ROO.2 2.09.21 .59	2,00	2,00	4,00	Rendah						
	memenuhi kebutuhan formasi jabatan yang tidak sesuai dengan DPA	Sekretaris	adanya formasi jabatan yang tidak terisi	Internal		C	beban kerja menjadi berlebih	OPD	ROO.2 2.09.21 .60	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keterlambatan Pelaksanaan pemeliharaan dan penyesuaian anggaran	Sekretaris	Perencanaan yang belum sesuai dengan kebutuhan	Internal		C	mundurnya jadwal pelaksanaan pemeliharaan	Karyawan Dispangtan	ROO.2 2.09.21 .61	2,00	2,00	4,00	Rendah						
	Barang milik daerah mengalami kerusakan	Sekretaris	Pemeliharaan barang milik daerah tidak tepat waktu	Internal		C	Barang milik daerah tidak dapat digunakan dengan optimal	Karyawan Dispangtan	ROO.2 2.09.21 .62	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	keterlambatan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sekretaris	belum terjadwalnya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Internal		C	kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan belum terpelihara dengan baik	OPD	ROO.2 2.09.21 .63	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional/la pangan mengalami kerusakan	Ka. UPT	Waktu pemeliharaan tidak sesuai dengan jadwal dan adanya kenaikan harga BBM	Internal		C	Urusan operasional lapangan tidak berjalan maksimal	OPD	ROO.2 2.09.21 .64	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	keterlambatan pemeliharaan dan pembayaran pajak perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0	belum terjadwalnya pemeliharaan dan pembayaran pajak perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Internal	C	kendaraan dinas operasional atau lapangan belum terpelihara dengan baik	OPD	ROO.2 2.09.21 .65	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pemeliharaan Mebel	Mebeler kantor mengalami kerusakan	Ka. UPT	Waktu pemeliharaan mundur dari jadwal	Internal	C	-	OPD	ROO.2 2.09.21 .66	2,00	2,00	4,00	Rendah						
	Keterlambatan pemeliharaan mebel	Sekretaris	belum terjadwalnya pemeliharaan mebel	Internal	C	mebel belum terpelihara dengan baik	OPD	ROO.2 2.09.21 .67	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin dan Peralatan mengalami kerusakan	Ka. UPT	Pemeliharaan belum tepat waktu	Internal	C	Menghambat ketepatan pekerjaan	OPD	ROO.2 2.09.21 .68	2,00	2,00	4,00	Rendah						
	Keterlambatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Sekretaris	belum terjadwalnya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Internal	C	peralatan dan mesin lainnya belum terpelihara dengan baik	OPD	ROO.2 2.09.21 .69	2,00	2,00	4,00	Rendah						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung dan bangunan kantor mengalami kerusakan	Ka. UPT	Pemeliharaan tidak tepat waktu	Internal	C	Gedung/bangunan tidak dapat dipakai dengan optimal	OPD	ROO.2 2.09.21 .70	2,00	2,00	4,00	Rendah						
	Keterlambatan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Sekretaris	belum terjadwalnya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Internal	C	gedung kantor dan bangunan lainnya belum terpelihara dengan baik	OPD	ROO.2 2.09.21 .71	2,00	2,00	4,00	Rendah						

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD	RISIKO		SEBAB		C/UC	DAMPAK		KODE RISIKO	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA	E/KE/TE	CELAH	RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
						URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	URAIAN SEBAB	SUMBER		URAIAN DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA		D	K	SKOR	KATEGORI						
PROGRAM																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keterlambatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Sekretaris	belum terjadwalnya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Internal	C	arana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya belum terlihara dengan baik	OPD	ROO.2 2.09.21 .72	2,00	2,00	4,00	Rendah						

Proses Penyusunan RTP Operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT

Hari : Senin
 Tanggal : 19 September 2022
 Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Aula Timur Lt II Dispangtan
 Acara : Penentuan Resiko RTP SPIP Operasional OPD Tahun 2023

No	Nama	Jabatan / Pangkat / Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1	Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si	Kepala Dinas	1	
2	drh. EVY NURWULANDARI	Sekretaris Dinas	2	
3	Ir. LULUK NURHAYATI	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	3	
4	Ir. SUHANTO, M.M	Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan	4	
5	drh. AGUS SASMITO	Kepala Bidang Veteriner	5	
6	drh. ARDIET FERMANSYAH	Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan	6	
7	Ir. SIGIT TRIYATMO	Kepala UPT Aneka Usaha Perikanan	7	
8	KUSALA DEWI, S.Pi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT AUP	8	
9	Ir. CHATARINA ENDANG SRI MULYANI	Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran	9	
10	SULASTRI, S.H	Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi	10	
11	ARDIPUTRA WATAMPONE, S.E, M.M	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	11	
12	Ir. TANTI BUDI MULYANI	Sub Koordinator Cadangan dan Pengendalian Konsumsi Pangan	12	
13	Ir. RUMANTININGSIH AMBARWATI, M.P	Sub Koordinator Kerawanan Pangan dan Keamanan Pangan	13	
14	Ir. SUNARNO, M.Pi	Sub Koordinator Sarana Prasarana Pertanian	14	
15	ARI RUMAWATI, S.Pi, M.Si	Sub Koordinator Penanggulangan Bencana dan Penyuluhan Pertanian	15	
16	ATIK SILVIATI, S.Pi	Sub Koordinator Perikanan	16	
17	drh. ABDUL AZIZ MUCHTARULHADI KUSUMO	Sub Koordinator Kesehatan Hewan	17	
18	SUDARMANTO, S.P, M.M	Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Hewan	18	
19	EDI SUSILARTO, SP	Analisis Pangan	19	
20	drh. RATNA SARI YUDANINGRUM	Medik Veteriner Muda	20	
21	AYUK WULANDARI, S.Pi	Analisis Perencana Evaluasi dan Pelaporan	21	
22	REZKA TRI NUGROHO, S.Pi	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	22	

No	Nama	Jabatan / Pangkat / Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
23	USWATUN CHASANAH, S.P	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	23	

Surakarta,

Penanggung Jawab / Penyelenggara Rapat

Ir. CHATARINA ENDANG SRI MULYANI
 Penata Tingkat I
 NIP 196005201992032005

Penyusunan RTP Operasional OPD